

Kode>Nama Rumpun Ilmu\* : 461 / Sistem Informasi  
Bidang Fokus\*\* : Teknologi Informasi dan Komunikasi

**LAPORAN  
PENELITIAN INTERNAL**



**Kesiapan Pemerintahan Desa Mekarbuana Karawang Dalam  
Penerapan *Smart Government*  
dengan Memanfaatkan Teknologi Opensource**

**TIM PENGUSUL**

**Yulhendri, ST, MT / 0307117103**

**Amo Sugiharto, S.E, MM / 0301077604**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**Agustus 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kesiapan Pemerintahan Desa Mekarbuana Karawang Dalam Penerapan “*smart Government*” dengan memanfaatkan Teknologi Opensource

Bidang Fokus : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode/Nama Rumpun : Sistem Informasi

**Ketua Peneliti** :

- a. Nama Lengkap : Yulhendri, S.T., M.T.
- b. NIDN : 0307117103
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Sistem Informasi
- e. No. HP/Surel : [08122440146/yulhendri@esaunggul.ac.id](mailto:08122440146/yulhendri@esaunggul.ac.id)

**Anggota (1)**



- a. Nama Lengkap : Amo Sugiharto, SE. MM
- b. Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
- Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun
- Biaya Penelitian : 19.750.000,-
- Biaya Luaran Tambahan: 0,-


Jakarta, 25 Agustus 2020

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Komputer**

**Ketua Peneliti**

  
  
**HABIBULLAH AKBAR, S.Si, M.Sc, Ph.D**  
NIK. 218030726

  
**Yulhendri, S.T., M.T.**  
NIK. 215010565

**Menyetujui Kepala LPPM Universitas Esa Unggul**

  
  
**DR. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc**  
NIK. 209100388

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Kesiapan Pemerintahan Desa Mekarbuana Karawang Dalam Penerapan “*smart Government*” dengan memanfaatkan Teknologi Opensource.
2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	<b>Yulhendri, S.T, M.T.</b>	Ketua	Sistem Informasi	UEU	10/14
2	<b>Amo Sugiharto, S.E, MM</b>	Anggota	Ekonomi Keuangan	UEU	10 /12

3. Objek Penelitian : Desa Mekarbuana Karawang
4. Masa  
Mulai : bulan: April tahun: 2020  
Berakhir : bulan: Desember tahun: 2020
5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang
  - Tahun ke-1 : Rp 19.750.000
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): Desa Mekarbuana Kecamatan Tegal Waru Karawang
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  
-
8. Temuan yang ditargetkan (metode, teori, produk, atau masukan kebijakan)
  - a. Adanya Informasi/identifikasi Pemanfaatan Teknologi Smart Village dilihat dari sisi Teknologi Informasi / Sistem Informasi dan juga dari sisi peningkatan perekonomian masyarakat.
  - b. Pemilihan Metode yang akan digunakan dalam implementasi “Smart Government”

- c. Tingkat Kesiapan/Kematangan Pemerintah Desa beserta perangkatnya untuk mengadopsi “Smart Government”.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek).

Dengan diukurnya tingkat kesiapan dan tingkat kematangan dari Pemerintahan Desa Mekarbuana Kabupaten Karawang ini dalam penerapan “Smart Governance”, akan membuat proses adopsi dan proses implementasi Smart Government yang merupakan bagian dari Smart Village akan menjadi lebih baik dan optimal.
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama jurnal ilmiah internasional bereputasi atau nasional terakreditasi dan tahun rencana publikasi) : Jurnal of Innovation Information Technology and Application (JINITA) tahun 2020.
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa sosial atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya : Bahan Ajar untuk Matakuliah Kapita Selekta Sistem Informasi.

# Daftar Isi

## Contents

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	3
Daftar Isi.....	5
RINGKASAN.....	7
Bab I Pendahuluan.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.1. Permasalahan.....	8
1.1.1 Sumber Daya Manusia.....	8
1.2.2 Aplikasi.....	9
1.2.3 Regulasi.....	9
1.2.4 Infrastruktur.....	9
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Hasil yang diharapkan.....	10
Bab II Tinjauan Pustaka.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Devinisi Smart Village.....	11
2.1.2 Smart Government.....	11
2.1.3 COBIT 5 Capability Model.....	11
2.2 Smart Village.....	12
Bab III Metode Penelitian.....	13
3.1 Metode Penelitian.....	13
3.2 Langkah-Langkah Penelitian.....	14
IV. Hasil dan Pembahasan.....	15
4.1 Hasil.....	15
4.2 Pembahasan.....	15
4.3 Solusi.....	22
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	24
5.1 Kesimpulan.....	24

5.2	Saran .....	24
	Daftar Pustaka .....	25



gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

## RINGKASAN

Meningkatnya arus urbanisasi ini, salah satu alasan utamanya adalah karena desa dinilai tidak memberi sumber kehidupan yang layak, sehingga penduduk memutuskan untuk mengadu nasib ke kota. Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan prioritas utama pemerintah sampai saat ini. Langkah itu untuk memangkas kempangan antara desa dengan kota. Sejak pertama kali UU Desa diimplementasikan, berbagai perubahan sosial dan politik terjadi di desa. Pertumbuhan ekonomi desa meningkat mencapai 12% pada tahun 2016, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5%. Jumlah desa ternggal mengalami penurunan dari 45% menjadi 32% dari total seluruh desa. Sementara desa yang mengalami perkembangan meningkat, dari 30% menuju 45%. Untuk mempercepat layanan pemerintah desa dalam melayani masyarakat maka digunakanlah teknologi “Smart Government” yang merupakan bagian dari teknologi “Smart Village”. Permasalahan yang ada dalam pengimplementasian Smart Government dalam rangka pemanfaatan Teknologi Smart Village yang merupakan langkah adopsi dari pengimplementasian Teknologi Smart City, ada 4 permasalahan utama, yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi, dan regulasi. Untuk itu dilakukan penilaian terhadap Pemerintahan Desa terkait dengan 4 bidang tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi Smart Government dan dengan memperbaiki tingkat kesiapan pemerintah desa dalam adopsi Smart Government akan mengoptimalkan implementasi Smart Government.

Keywords : *Smart Government*, Pemerintahan Desa, Smart Village

# Bab I Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit terkecil dalam tata kelola pemerintahan, merupakan komponen penggerak dalam menggerakkan masyarakat Indonesia. Jika proses pembangunan nasional yang dijalankan cenderung bias kota, maka permasalahan sosial dan politik seperti tentang meningkatnya urbanisasi akan terjadi. Pada tahun 2016, sekitar 52% dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di kota. Bandingkan dengan data tahun 2010 di mana hanya 49,79% penduduk yang tinggal di kota dan 50,21% tinggal di desa (BPS, 2011). Meningkatnya arus urbanisasi ini, salah satu alasan utamanya adalah karena desa dinilai tidak memberi sumber kehidupan yang layak, sehingga penduduk memutuskan untuk mengadu nasib ke kota. Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan prioritas utama pemerintah sampai saat ini. Langkah itu untuk memangkas kempangan antara desa dengan kota. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, mempunyai tugas untuk menjalankan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tujuannya, tidak lain adalah untuk menciptakan “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” sebagai yang tercantum dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.

Untuk menjawab tantangan di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya, salah satunya melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak pertama kali UU Desa diimplementasikan, berbagai perubahan sosial dan politik terjadi di desa. Pertumbuhan ekonomi desa meningkat mencapai 12% pada tahun 2016, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5%. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan dari 45% menjadi 32% dari total seluruh desa. Sementara desa yang mengalami perkembangan meningkat, dari 30% menuju 45% (World Bank, 2017).

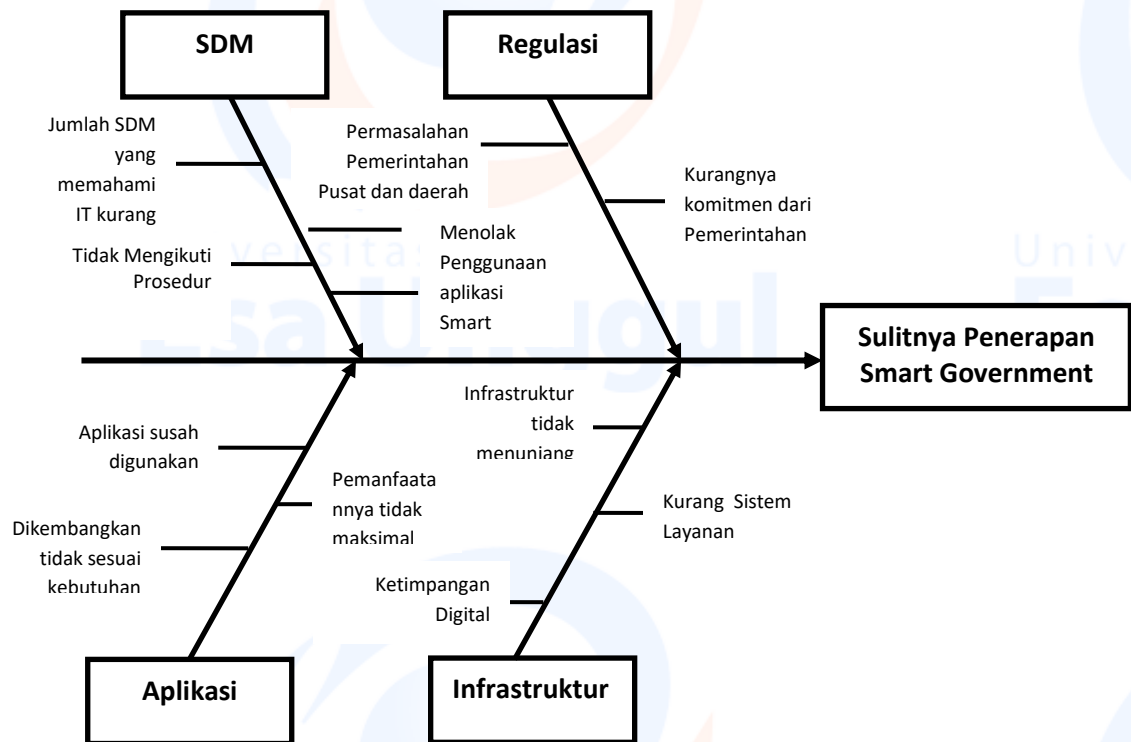
### 1.1. Permasalahan

Kalau kita lihat permasalahan yang ada dalam pengimplementasian Smart Government dalam rangka pemanfaatan Teknologi Smart Village yang merupakan langkah adopsi dari pengimplementasian Teknologi Smart City, ada 4 permasalahan utama, yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi, dan regulasi. Kalau kita lihat secara detail, maka permasalahan tersebut adalah :

#### 1.1.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan pengelolaan sebuah aplikasi IT dibutuhkan keterampilan namun, dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sekarang hal itu sangat kurang disertai dengan adanya beberapa orang di pemerintahan yang menolak penggunaan sistem baru tersebut (*Smart-Government*) sehingga penerapannya akan terhambat. Dalam mengembangkan sistem ini diperlukan banyak persiapan dan faktor sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama jika sistem ini berhasil. Kesiapan dari segi manusia sangat dibutuhkan.





**Gambar 1.1 Diagram Ishikawa**

### 1.2.2 Aplikasi

Aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendukung “Smart-Government” memang telah banyak tersedia namun, dalam pengembangannya banyak aplikasi yang dikembangkan tanpa melihat urgensi dari aplikasi tersebut. Jumlah aplikasi yang terlampau banyak juga menjadi faktor karena akan timbul kebingungan karena terlalu banyak aplikasi dengan fungsi yang harusnya dapat digabungkan. Pemanfaatan dari aplikasi tersebut juga kurang maksimal karena ketidaktahuan dalam mengoperasikannya.

### 1.2.3 Regulasi

Regulasi menjadi faktor penting dalam penerapan E-Government hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan karena, seperti yang kita ketahui banyaknya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras menyebabkan sistem baru ini sulit di implementasikan terutama karena ketentuan e-government sendiri sangat umum pendefinisianannya pada Inpres no 3 tahun 2003 tersebut. Komitmen yang kurang juga dari pemerintah dapat dilihat dengan banyaknya anggaran yang disalahgunakan oleh para pejabat.

### 1.2.4 Infrastruktur

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan keadaan alam yang sangat berbeda. Infrastruktur untuk tiap tempat juga sangat berbeda sehingga jika ingin dilakukan sebuah

penerapan sistem secara terpusat dan menyeluruh sangat susah seperti di Jakarta dan Papua misalnya keadaan infrastruktur sangatlah berbeda sehingga banyaknya ketimpangan antara daerah yang maju dan tertinggal. Ketimpangan ini menyebabkan kesulitan dalam membuat sebuah sistem terpusat.

### 1.3 Tujuan

1. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesiapan Pemerintahan Desa Mekarbuana Kabupaten Karawang dalam menerapkan “*Smart Government*”.
2. Mengarahkan stakeholder yang terkait di Desa Mekar Buana Karawang agar implementasi “*Smart Government*” sesuai dengan yang diharapkan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Agar Pemerintahan Desa bisa mempersiapkan diri dalam 4 aspek yang disebutkan dalam permasalahan bagian 1.1 untuk memastikan implementasi “*Smart Government*” yang merupakan dari implementasi “*Smart Village*” bisa berjalan dengan baik.
2. 4 aspek permasalahan (SDM, Aplikasi, Regulasi, dan Infrastruktur) bisa dibahas lebih detail untuk memastikan tidak ada permasalahan dalam implementasi “*Smart Government*”

### 1.5 Hasil yang diharapkan

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan Pemerintahan Desa juga dapat mengimplementasikan beberapa aspek teknologi “*Smart City*” yang disesuaikan menjadi teknologi “*Smart Village*”, khususnya implementasi “*Smart Government*”.

## Bab II Tinjauan Pustaka

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Devinisi Smart Village

Smart Village (Desa Cerdas) didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat pedesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri serta pada saat yang sama terdapat usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun baru dan pelayananan ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (European Network for Rural Development, 2018).

#### 2.1.2 Smart Government

Smart Government (Pemerintahan Cerdas) menyangkut salah satu unsur terpenting dalam perkotaan yaitu Badan / Instansi Pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi Teknologi Informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Sama seperti fungsi dasar dari pemerintahan yaitu mengelola semua aspek informasi data yang berkaitan dengan perkotaan termasuk didalamnya ada masyarakat, infrastruktur, jaringan, sumberdaya, kebijakan, perekonomian, dan lingkungan. dalam kaitannya dengan konsep smart government semua informasi data yang diatas dikonversikan dalam bentuk digital agar dapat di simpan dalam suatu "database" yang nantinya dapat diakses oleh yang berkepentingan melalui jaringan online dimana saja dan kapan saja.

#### 2.1.3 COBIT 5 Capability Model

COBIT 5 merupakan capability model framework, tingkat kapabilitas diukur dengan menggunakan Base practice, Work product dan Process attribute. Proses atribut yang digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian proses berbeda-beda disetiap tingkatnya. Yang terdiri atas 5 level.

Tabel 1. Proses Atribut COBIT 5

Process Attribute ID	Capacity Level and Process Attributs
	<b>Level 0 : Incomplete process</b>
	Level 1 : Performed process Process performance
<b>PA 1.1</b>	<b>Level 2 : Managed process</b>
<b>PA 2.1</b>	Performance management

PA 2.2	Work product management
<b>Level 3 : Established process</b>	
PA 3.1	Process definition
PA 3.2	Process deployment
<b>Level 4 : Predictable process</b>	
PA 4.1	Process measurement
PA 4.2	Process control
<b>Level 5 : Optimizing process</b>	
PA 5.1	Process Innovation
PA 5.2	Process Optimization

## 2.2 Smart Village

Smart village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari smart city. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Jika smart city diimplementasikan di level kota, maka smart village diimplementasikan di level desa. Smart city sendiri dimaknai sebagai sebuah kota cerdas. Smart City adalah pengembangan konsep, implementasi, dan implementasi teknologi yang diterapkan pada suatu daerah (terutama perkotaan) sebagai interaksi kompleks antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratt, 2014: 94).

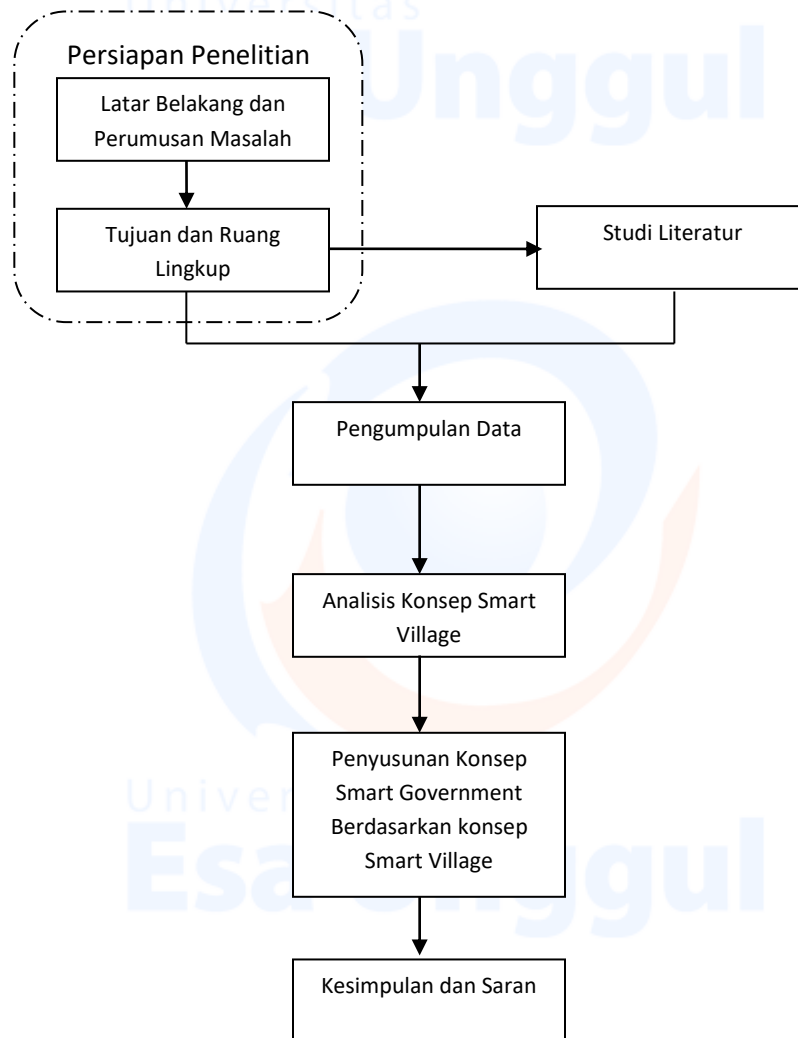
Mengadopsi dari sistem smart city maka smart village pada mulanya juga memiliki tujuan yang sama. Yakni memberikan tawaran solusi pada masalah pedesaan, Seperti misalnya masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keterlebelakangan teknologi, kekurangan informasi, dan masalah lainnya khas kawasan rural. Berbagai akademisi mencoba mendefinisikan smart village, diantaranya definisi dari European Network for Rural Development: *Smart villages are rural areas and communities which build on their existing strengths and assets as well as new opportunities to develop added value and where traditional and new networks are enhanced by means of digital communications technologies, innovations and the better use of knowledge for the benefit of inhabitants.*

Penerapan smart city dalam konteks Indonesia setidaknya didukung oleh 3 (tiga) elemen utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi (Prakoso, 2018; Utomo & Hariadi, 2016). Perkembangan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi pintu gerbang penerapan electronic government dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (Dengen & Hatta, 2009; Hasibuan, 2007; Yunita & Aprianto, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak mengalami perkembangan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik (Fahlefi, 2014; Holle, 2011; Nugraha, 2018) yang diterapkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah (Pratama, Hakim, & Shobaruddin, 2015).

## Bab III Metode Penelitian

### 3.1 Metode Penelitian

Metode pelaksanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.1 Metode Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan tahapan kerangka pemikiran sebagai berikut:

- a. Tahap awal adalah memahami latar belakang dari desa saat ini termasuk perkembangan desa setelah terbitnya Undang-Undang desa, kemudian dari latar belakang tersebut peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang

- timbul di desa di tinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek bisnis/ekonomi, aspek teknologi maupun aspek insfrakstruktur.
- b. Tahap berikutnya adalah tahap menentukan tujuan dan ruang lingkup, dimana tujuan penelitian mengenai Smart Village mengacu pada manfaat dari penelitian tersebut dan ruang lingkupnya yang mencakup batasan area yang akan di teliti baik berdasarkan lokasi.
  - c. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data langsung ke desa Mekarbuana Kabupaten Karawang.
  - d. Analisa konsep Smart Government menggunakan konsep Smart Village.
  - e. Penyusunan Konsep Smart Government menggunakan konsep Smart Village.

### 3.2 Langkah-Langkah Penelitian

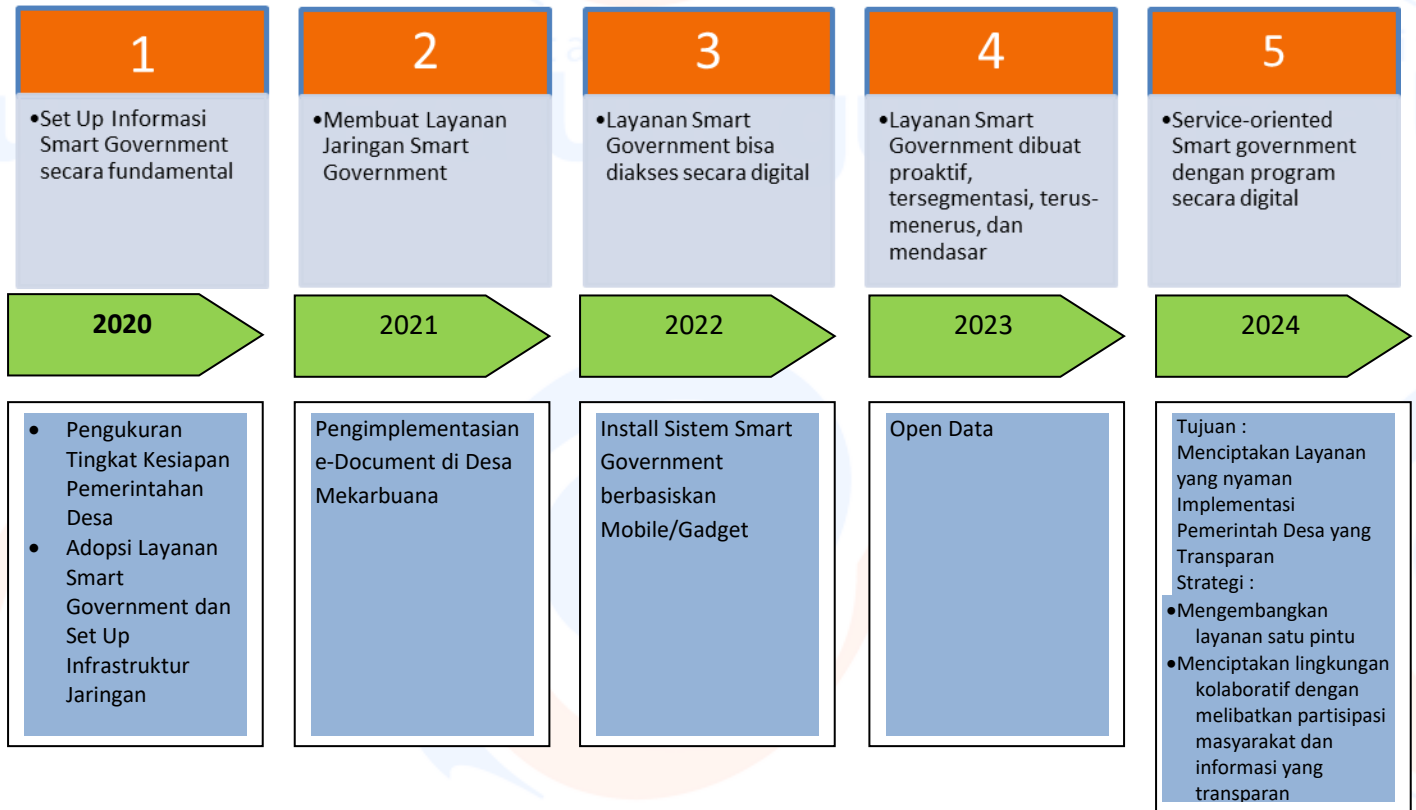
Penyusunan desain Smart Government ini menggunakan konsep Smart Village, dimana terlebih dahulu dilakukan identifikasi karakteristik sebuah desa yang di kaitkan dengan prinsip dari Smart Village dan karakteristik dari Smart Village. Adapun tahapan penelitian seperti gambar 3.2 :



## IV. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

Proses Implementasi Smart Government berdasarkan Konsep Smart Village di Desa Mekarbuana Kabupaten Karawang dapat kita gambarkan sebagai pengembangan konsep dalam waktu 4 tahap sebagai berikut berikut :



Gambar 4.1 Implementasi Konsep Smart Government di Desa Mekarbuana Kabupaten Karawang Jawa Barat

### 4.2 Pembahasan

Dalam Proses implementasi Smart Government di Desa Mekarbuana Kabupaten Karawang, ada 5 Fase yang dilakukan, yaitu :

4.2.1 Fase SetUp Informasi Smart Government secara fundamental. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- Pengukuran Tingkat Kesiapan Pemerintahan Desa
- Adopsi layanan Smart Government dan Setup Infrastruktur Jaringan (Networking)

4.2.2 Fase Membuat Layanan Jaringan Smart Government. Langkah yang dilakukan adalah Pengimplementasian e-Document di Desa Mekarbuana.



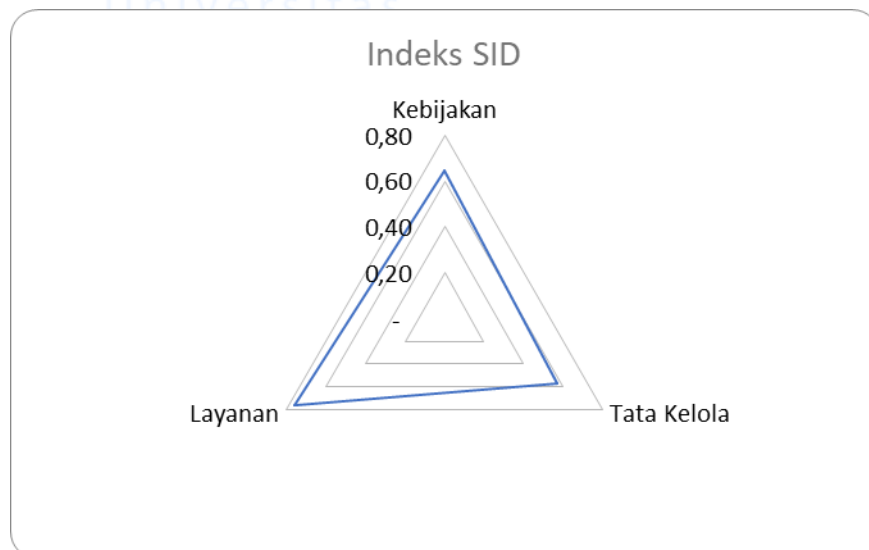
- 4.2.3 Fase Layanan Smart Government bisa diakses secara digital. Langkah yang dilakukan adalah install sistem Smart Government berbasis Mobile/Gadget
- 4.2.4 Fase Layanan Smart Government dibuat proaktif, tersegmentasi, terus-menerus dan Mendasar. Langkah yang dilakukan adalah membuat Open Data.
- 4.2.5 Fase Service Oriented Smart Government dengan program secara digital. Langkah yang dilakukan adalah menciptakan layanan yang nyaman dan mengimplementasi pemerintah desa yang transparan dengan melaksanakan pengembangan layanan satu pintu serta menciptakan lingkungan kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat dan informasi yang transparant.

Indeks SID	0.69
Domain	Indeks
Kebijakan	0.65
Tata Kelola	0.57
Layanan	0.76

Gambar 4.2 Indeks Sistem Informasi

**Indeks SID**

Dari sisi pembahasan Kebijakan total nilai indeks yang didapat adalah 0.65 sedangkan dari sisi tata Kelola mendapatkan total nilai indeks, 0.57. Sisi layanan mendapatkan total nilai 0.76. Kalau dilihat dalam bentuk matriks akan terlihat seperti gambar :



Gambar 4.3 Grafik Indeks Sistem Informasi Desa



Indeks Domain Kebijakan	0.65
Aspek	Indeks
Kebijakan Tata Kelola	0.43
Kebijakan Layanan	0.80

Gambar 4.4 Grafik Indeks Sistem Informasi Desa

**Indeks Domain Kebijakan** terkait dengan aspek Kebijakan Tata Kelola mendapat total nilai indeks 0.43. Dari aspek Kebijakan Layanan 0.80. Dari bentuk grafik akan terlihat seperti gambar di bawah ini :



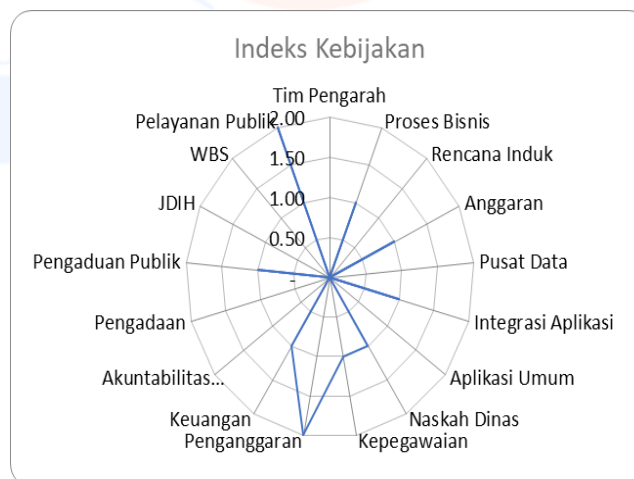
Gambar 4.5 Indeks Kebijakan

Indeks Domain Kebijakan	0.65
Indikator	Indeks
Tim Pengarah	-
Proses Bisnis	1.00
Rencana Induk	-
Anggaran	1.00
Pusat Data	-
Integrasi Aplikasi	1.00
Aplikasi Umum	-
Naskah Dinas	-

Indeks Domain Kebijakan	0.65
	1.00
Kepegawaian	1.00
Penganggaran	2.00
Keuangan	1.00
Akuntabilitas Kinerja	-
Pengadaan	-
Pengaduan Publik	1.00
JDIH	-
WBS	-
Pelayanan Publik	2.00

Gambar 4.6 Indeks Domain Kebijakan

**Indeks Domain Kebijakan terkait dengan** Tim Pengarah, Pusat Data, aplikasi umum, Akuntabilitas Kinerja, Pengadaan, JDIH, WBS, memiliki nilai indeks 0. Sedangkan Proses Bisnis, Anggaran, Integrasi Aplikasi, Naskah Dinas, Kepegawaian Keuangan, Pengaduan Publik dengan nilai indeks 1. Penganggaran, Pelayanan Publik mendapat nilai indeks 2. Kalau dilihat dari sisi grafik akan terlihat seperti gambar dibawah ini.

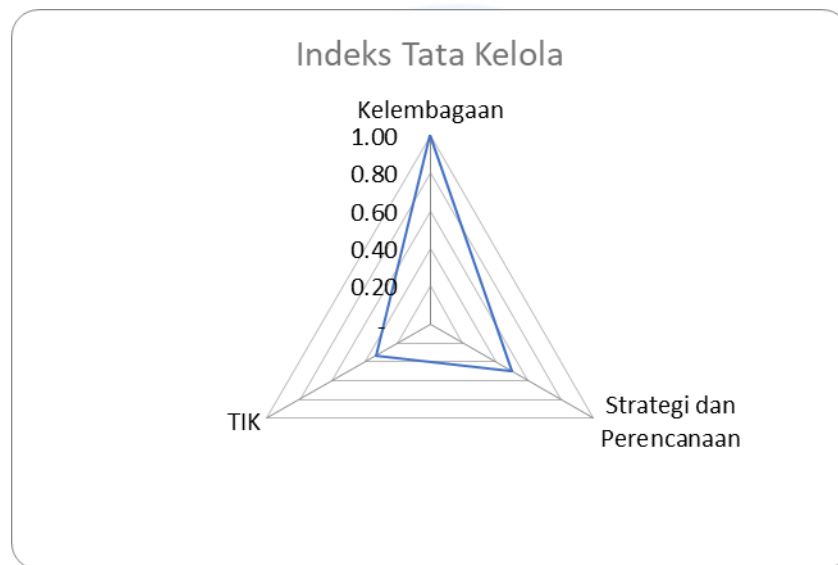


Gambar 4.7 Domain Kebijakan

<b>Indeks Domain Tata Kelola</b>	<b>0.57</b>
<b>Aspek</b>	<b>Indeks</b>
Kelembagaan	1.00
Strategi dan Perencanaan	0.50
TIK	0.33

Gambar 4.8 Kebijakan Indeks Domain Tatakelola

Indeks Domain Tata Kelola untuk aspek kelembagaan mendapat nilai indeks 1, strategi dan perencanaan mendapat nilai indeks 0.5, dan aspek TIK mendapat nilai indeks 0.33 dan dilihat dari grafik akan kelihatan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 4.9 Indeks Tata Kelola

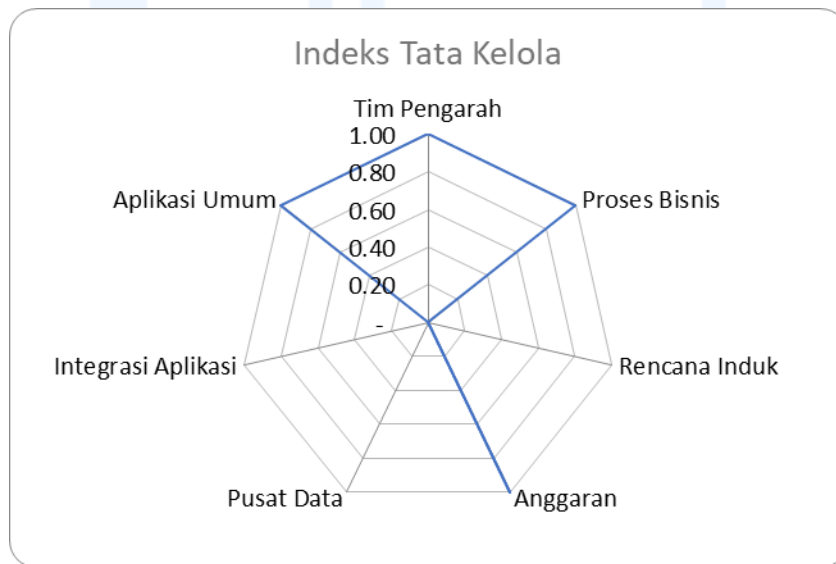
<b>Indeks Domain Tata Kelola</b>	<b>0.57</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Tim Pengarah	1.00
Proses Bisnis	1.00
Rencana Induk	-
Anggaran	1.00
Pusat Data	-

Gambar 4.10 Indeks

Integrasi Aplikasi	-
Aplikasi Umum	1.00

Domain Tatakelola

Indeks Domain Tatakelola indikator Tim Pengarah, Proses Bisnis, Anggaran, Aplikasi Umum dengan indeks 1, dan untuk Rencana Induk, Pusat Data, Integrasi Aplikasi dengan nilai indeks 0. Dan kalau digambarkan dalam bentuk grafis untuk Domain Tatakelola akan terlihat seperti grafik dibawah ini.



Gambar 4.11 Indeks Tatakelola

<b>Indeks Domain Layanan</b>	<b>0.76</b>
<b>Aspek</b>	<b>Indeks</b>
Layanan Adpem	0.71
Layanan Publik	0.83

Gambar 4.12 Indeks Domain Layanan

Indeks Domain layanan untuk aspek layanan administrasi pemerintahan mendapat nilai indeks 0.71. Untuk aspek layanan publik mendapat nilai indeks 0.83



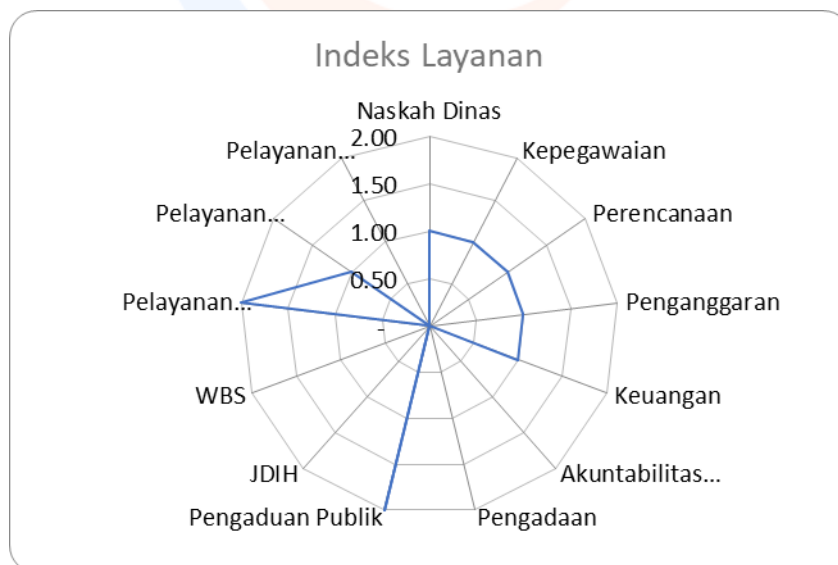
Gambar 4.13 Indeks Layanan

<b>Indeks Domain Layanan</b>	<b>0.76</b>
<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Naskah Dinas	1.00
Kepegawaian	1.00
Perencanaan	1.00
Penganggaran	1.00
Keuangan	1.00
Akuntabilitas Kinerja	-
Pengadaan	-
Pengaduan Publik	2.00
JDIH	-
WBS	-
Pelayanan Publik 1	2.00
Pelayanan Publik 2	1.00
Pelayanan Publik 3	-

Gambar 4.14 Indeks Domain Layanan

Indeks domain layanan untuk indikator naskah dinas, kepegawaian, perencanaan, penganggaran, keuangan, akuntabilitas, pengadaan, pengadaan publik, JDIH, WBS, Pelayanan publik 1, Pelayanan Publik 2, Pelayanan Publik 3.

Bila dilihat dalam bentuk grafik akan terlihat seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4.15 Indeks Layanan

Bila dilihat dari keseluruhan domain yang dinilai tingkat kematangan masing-masing berada ditingkat rata-rata 1 atau bahkan nol, hanya beberapa aspek pada beberapa domain yang tingkat kematangannya 2. Artinya bahwa secara keseluruhan tingkat kematangan Pemerintah Desa Tegalwaru Kabupaten Karawang masih dalam tahap yang kurang (dibawah 1, 1 dan paling tinggi indeksnya hanya 2).

Dilihat dari skala indeks domain-domain tersebut tingkat kesiapan pemerintah desa Mekar Buana dalam pengimplementasian Smart Village masih dalam posisi rendah. Artinya bahkan masih ada domain yang nilainya 0. Sehingga perlu ada usaha untuk meningkatkan indeksnya. Agar proses implementasi Smart Village bisa berjalan dengan baik. Untuk proses peningkatan Indeks Kematangan itu 5 hal point penting yang perlu ditingkatkan adalah sisi SDM, Aplikasi, Regulasi, dan Infrastruktur, prosedur di pemerintahan desa.

### 4.3 Solusi

Berdasarkan 5 Faktor penting itu yang perlu diperhatikan adalah aspek SDM, Regulasi, Infrastruktur dan Prosedur yang jelas. Dalam aspek SDM kita perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui proses training. Untuk peningkatan dari sisi aplikasi dan infrastruktur terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan sistem informasi desa yang juga memerlukan kerjasama dengan penyedia layanan infrastruktur khususnya jaringan. Sistem informasi

sebaiknya melihat dari kebutuhan SDM dan proses bisnis yang telah diperbaiki. Untuk mendukung terbentuknya ekosistem digital maka dibutuhkan regulasi yang dapat menghubungkan antara instansi desa dan dengan pemerintah serta industri. Demi terjalannya hubungan pihak-pihak tersebut dengan baik maka perlu juga dirumuskan prosedur pelaksanaan dan evaluasi yang dapat meningkatkan keberlanjutan proses implementasi *smart village*.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari proses penilaian tingkat kematangan Pemerintahan Desa Mekarwangi dalam proses implementasi Smart Village ini, didapatkan kondisi nilai index yang rendah. Sehingga perlu proses atau kegiatan yang ditujukan untuk meing adalah dengan melakukan proses penentuan tingkat kesiapan pemerintahan Desa Mekarbuana Kabupaten Karawang ini menjadi lebih baik dalam proses implementasi Smart Government.

### **5.2 Saran**

Sebaiknya hasil dari penelitian ini bisa diadopsi oleh Desa lainnya agar proses implementasi Smart Government menjadi lebih baik dan terarah.



## Daftar Pustaka

- Aditama, R. "Penerapan Konsep Smart Governance Pada Smart Village." Diakses pada 7 Maret 2019. <https://kumparan.com/royan-aditama/penerapan-konsep-smart-governance-pada-smart-village-1522820469658>
- Agusta, Ivanovich. "Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa." Wacana 9, no. 2 (2007): 135-153.
- Andari, Rosita Novi, and Susy Ella. "Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia." Jurnal Borneo Administrator 15, no. 1 (2019): 41-58.
- Andhika, Lesmana Rian. "Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan." Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 3, no. 1 (2018): 24-42.
- Angkasawati, Angkasawati. "Masyarakat Desa." Jurnal PUBLICIANA 8, no. 1 (2015): 72-87.
- Ayu, Y. S. P. "Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Smart Village." Diakses pada 7 Maret 2019. <https://www.kompasiana.com/pkdodlanri/5a992c7edd0fa859045db843/membangun-indonesia-dari-pinggiran-melalui-smart-village?page=all>
- Badri, Muhammad. "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)." Jurnal Dakwah Risalah 27, no. 2 (2016): 62-73.
- Chatterjee, Sheshadri, and Arpan Kumar Kar. "Concept of Smart Village in India: A Proposed Ecosystem and Framework." In *Advances in Smart Cities*, pp. 83-92. Chapman and Hall/CRC, 2017.
- Dengen, Nataniel, and Heliza Rahmania Hatta. "Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser." Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer 4, no. 1 (2009): 47-54.
- Eko, S. *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2015.
- Essabela, S. "Menuju Konsep Smart City. Diakses pada 3 Maret 2019." [https://www.researchgate.net/publication/322303099\\_Menuju\\_Konsep\\_Smart\\_City](https://www.researchgate.net/publication/322303099_Menuju_Konsep_Smart_City).